**IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

### URUSAN PENUNJANG

**Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, tujuan strategik yang ingin dicapai oleh Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Misi Kedua Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional bertujuan : (1) Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN); (2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih transparan, dan akuntabel; (3) Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif dengan sasaran strategik meningkatnya kompetensi aparatur daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, pada tahun 2018 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelaksana Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.18.064.235.794,- (delapan belas milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan anggaran setelah perubahan bertambah menjadi Rp.18.686.307.530,- (delapan belas milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Jumlah anggaran tersebut bersumber dari APBD murni sebesar Rp. 8.470.157.530,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 50 kegiatan, dan Dana Kontribusi (Lain-lain PAD yang Sah) sebesar Rp. 10.216.150.000,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 24 kegiatan.

Dari total alokasi anggaran setelah perubahan diperoleh realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 9.482.011.254,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh dua juta sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), dengan persentase pencapaian keuangan sebesar 50.74% dan realisasi fisik sebesar 77,8%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 (lima) program non urusan dan 2 (dua) program urusan penunjang pendidikan dan pelatihan. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena sebanyak 21 kegiatan dengan sumber dana kontribusi batal dilaksanakan karena kuota peserta yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya kuota peserta ini disebabkan karena banyak Kabupaten/Kota yang tidak mengirim peserta sesuai dengan perencanaan awal kegiatan dalam forum OPD Kediklatan. Adanya kebijakan anggaran daerah Kab/Kota yang lebih memprioritaskan anggarannya untuk infrastruktur dan penganggaran TPP Kesejahteraan Pegawai sehingga anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur tidak menjadi prioritas menjadi penyebab banyaknya kegiatan Diklat Kontribusi ini batal dilaksanakan.

1. **Program non urusan**

Program non urusan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan melalui 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.4.462.088.244,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.932.315.497,- (88,13%), fisik (100%). Program non urusan yang dilaksanakan pada tahun 2018, adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.415.085.469,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.956.215.812,- (86,56%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator outcome program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 100% telah tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 15 kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
10. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13. Penyediaan Jasa Tenaga Sopir
14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
15. Penyediaan Jasa Loundry

Dalam pelaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan opersional sehingga secara fisik kegiatan sudah terlaksana 100%. Tidak tercapainya target realisasi keuangan sebesar 95% disebabkan karena adanya beberapa kendala yang akan dijelaskan pada paragraf dibawah ini.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat sisa sebesar Rp. 141.318.772,- dengan realisasi keuangan sebesar 80.36% yang disebabkan karena belanja dibayarkan sesuai tagihan.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur terdapat sisa Rp. 5.494.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 61.43% yang disebabkan karena adanya belanja makan minum yang telah dianggarkan untuk kegiatan senam bersama di kantor gubernur, namun hingga akhir bulan desember belum ada undangan pelaksanaan senam bersama dari penyelenggara sehingga belanja makan minum tersebut tidak dapat direalisasikan.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terdapat sisa sebesar Rp. 194.965.422,- yang merupakan sisa tender yang harus dikembalikan sebagai SILFA, akibatnya realisasi keuangan menjadi 82.39%.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Loundry terdapat sisa sebesar Rp.38.031.000,- dengan realisasi sebesar 49.29% yang disebabkan karena Biaya loundry yang telah dianggarkan sebelumnya yang direncanakan untuk pemakaian kamar peserta kegiatan fasilitasi Latsar Kemenkumham tidak jadi terpakai karena kegiatan fasilitasi sebagian dilaksanakan diUNP.

Disamping beberapa kendala diatas, terdapat sisa dana karena efisiensi balanja dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan ATK, kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan serta kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/penerangan Bangunan Kantor, dimana belanja-belanja tersebut dibayarkan dengan harga dibawah standar harga Pergub.

1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 541.109.900,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 493.201.263(91,15%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator outcome program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dengan target 100% telah tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
7. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan operasional kegiatan. Tidak tercapainya target realisasi keuangan sebesar 95% sebagian besar disebabkan karena adanya efisiensi belanja dengan harga dibawah standar harga DPA, serta adanya sisa uang assuransi dan oli kendaraan yang hanya dibayarkan sesuai tagihan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional .

1. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur BPSDM dalam berpakaian dinas melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dengan alokasi anggaran Rp. 68.456.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.456.000,- (100%) dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Indikator outcome program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu meningkatnya disiplin berpakaian Aparatur BPSDM Prov. dengan target 100% telah tercapai sebesar 100%.

1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur BPSDM. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.672.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 110.064.300,- (97,69%) dan realisasi fisik 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penugasan Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis terhadap ASN. Indikator outcome program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Terjadinya peningkatan kualitas dan wawasan ASN dengan target 100% telah tercapai sebesar 100%.

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.764.275,- dengan realisasi keuangan Rp. 304.378.122,- (93,72%) dan realisasi fisik 100%. Indikator outcome program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yaitu Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan kinerja SKPD dengan target 60% telah tercapai sebesar 60%.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.28.922.500,- telah tercapai realisasi keuangan sebesar Rp.27.572.500,- (95,33%) dan realisasi fisik sebesar 100% yang artinya penyusunan dokumen perencaaan dan penganggaran OPD BPSDM Provinsi Sumbar telah terlaksana.

1. Penatausahaan Keuangan SKPD

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.629.650,- dengan realisasi keuangan Rp. 242.706.522,- (92,77%) dan realisasi fisik 100% yang artinya penatausahaan keuangan dan penusunan Laporan Keuangan SKPD BPSDM Provinsi Sumbar telah terlaksana sebagaimana mestinya. Namun, tidak tercapainya target realisasi keuangan sebesar 95% disebabkan karena adanya sisa pembayaran honor PPTK yang terlanjur dianggarkan berdasarkan asumsi pagu kegiatan tahun lalu sebelum pagu kegiatan masing-masing PPTK diketahui.

1. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.212.125,- telah tercapai realisasi keuangan sebesar Rp. 34.099.100,- (99,67%) dan realisasi fisik sebesar 100%, yang artinya penyusunan dokumen kinerja T1-T4, Penetapan Kinerja Pejabat, Laporan Triwulan Capkin, LAKIP OPD, LKPJ/LPPD dan Laporan Realisasi capaian fisik dan keuangan telah terlaksana.

1. **Program Urusan**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat manjalankan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan. Adapun program urusan yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat ini adalah Program Urusan Kepegawaian yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Pendidikan Kedinasan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

1. **Program Pendidikan Kedinasan**

Indikator outcome program Pendidikan Kedinasan ini adalah meningkatnya kompetensi manajerial JPT, administrastrator dan pengawas Provinsi Sumatera Barat. Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.612.674.216,- yang berasal dari 2 sumber dana yaitu ABPD murni sebesar Rp.2.839.524.216,- (23,51%) dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan, sedangkan yang berasal dari dana kontribusi sebesar Rp.9.773.150.000,- (54,67%) dengan jumlah kegiatan sebanyak 23 kegiatan.

Komposisi Anggaran Program Pendidikan Kedinasan

Tahun Aanggaran 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Sumber Dana** | |
| **APBD Murni** | **Dana Kontribusi** |
| Jumlah Kegiatan | 12 Kegiatan | 23 Kegiatan |
| Pagu Anggaran 2018 | Rp. 2.839.524.216,- | Rp. 9.773.150.000,- |
| Komposisi sumber dana | 23,51 % | 77,49 % |
| Realisasi Anggaran 2018 | Rp. 2.371.267.758,- | Rp. 2.247.600.758,- |
| Capaian Keuangan | 83,51 % | 23,00 % |

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) Jenis Pengembangan Kompetensi menurut klasifikasi kediklatan berikut.

1. **Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial**

Kegiatan Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan menggunakan 2 (dua) sumber dana, yaitu dana APBD murni dan dana kontribusi. Anggaran yang berasal dari dana APBD murni adalah sebesar Rp.1.950.798.666,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.580.130.744,- (81%) terdiri dari 6 kegiatan. Sedangkan Anggaran yang berasal dari dana kontribusi adalah sebesar Rp.7.398.150.084,- dengan realisasi keuangan Rp.2.247.600.758,- (30.38%) dan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan.

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Diklat ini diikuti oleh sebanyak 24 orang peserta berasal dari Pejabat Eselon III Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan sumber dana yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 520.261.650,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 509.192.300,- (97,87%) dan realisasi fisik 100%.

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (1 angkatan)

Diklat ini diikuti oleh 29 orang peserta yang berasal dari Pejabat eselon IV Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dukungan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.586.670.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.504.541.800,- (86,00%) dan capaian realisasi fisik 100%.

1. Diklat Kepemimpinan TK II/Reform Leader Academy (RLA).

Kegiatan ini bermaksud untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi untuk eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya pengiriman peserta dilakukan terhadap 6 orang pejabat struktural dimana 1 orang pejabat eselon II dikirim ke Pudiklat LAN RI dan 5 orang pejabat eselon III dikirim ke PKP2A IV LAN Aceh. Biaya pengiriman dibebankan pada DPA BPSDM Provinsi Sumbar dengan dukungan sumber dana APBD Perubahan sebesar Rp.418.259.000,-. Kegiatan pengiriman peserta diklat PIM Tk. II/LRA ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.240.786.278,- (57,57%). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena sebanyak 1 orang calon peserta diklat batal dikirim dengan alasan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Disamping itu adanya sisa biaya perjalanan dinas karena anggaran kegiatan Bench Marking yang semula direncanakan ke Jepang, pada realisasinya dilaksanakan di Filipina & Vietnam. Hal ini membuat realisasi biaya transportasi dan tiket pesawat menjadi terpangkas dari yang telah dianggarkan.

1. Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Manajerial

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan Koordinasi dan evaluasi ke 19 Kab/Kota dilingkungan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kebutuhan peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan standar penyelenggaraan Diklat Manajerial. Kegiatan ini menggunakan anggaran dengan sumber dana APBD sebesar Rp.69.170.000,- terealisasi dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.64.084.618,- (92,65%). Tidak tercapainya target realisasi keuangan 95 % disebabkan karena alasan efisiensi perjalanan dinas.

1. Pengiriman Peserta Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol III dan II

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengiriman Peserta Diklat Latsar bagi CPNS Gol III dan II sebanyak 7 (tujuh) orang CPNS dilingkungan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi CPNS sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS. Pengiriman dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebanyak 4 orang CPNS Golongan II yang dikirim ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, dan pada tahap kedua sebanyak 3 orang CPNS Golongan III dikirim ke Pusdiklat LAN Jakarta. Pengiriman dilaksanakan dengan biaya yang dibebankan pada DPA BPSDM Provinsi Sumbar dengan dukungan sumber dana APBD murni sebesar Rp.222.738.000,-. Kegiatan ini terealisasi dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.172.463.598,- (77,43%). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena alasan efisiensi, dimana Perjalanan Dinas Mentor yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali ke Surabaya, namun terealisasi hanya 1 kali dengan harga tiket dibawah standar biaya dan DPA. Begitu juga halnya dengan biaya transportasi/tiket pengiriman peserta yang telah dianggarkan ke Surabaya namun dikarenakan penyelengaraan Latsar hanya ada di Jawa Timur untuk CPNS golongan II dan di LAN Jakarta untuk CPNS Golongan III maka biaya transportasi peserta menjadi lebih murah dari yang telah dianggarkan sehingga realisasi belanja perjalanan dinas pada kegiatan ini menjadi lebih kecil.

1. Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2 (2 angkatan)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi CASN Kategori 1 dan 2 yang berasal dari Guru Garis Depan SMA/SMK di lingkungan Provinsi Sumatera Barat sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran APBD murni sebesar Rp.133.700.016,- dengan realisasi keuangan sebesar RP.89.062.150,- (66,61%) dan realisasi fisik 100% yang artinya kegiatan telah selesai dilaksanakan. Hanya saja jumlah peserta yang dianggarkan sebanyak 57 orang, pada pelaksanaannya hanya diikuti oleh 54 orang peserta. Hal ini menyebabkan berkurangnya indeks biaya yang terealisasi sebanyak 3 orang peserta. Rendahnya realisasi keuangan ini juga disebabkan karena pembayaran honor WI Daerah yang harus mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 bahwa pembayaran honorarium WI dengan syarat harus melebihi jumlah minimal jam tatap muka 21 JP, sedangkan dalam pelaksanaannya masih banyak Widyaiswara yang belum memenuhi jam wajib tersebut sehingga honor WI tidak dapat dibayarkan.

1. Diklat Kepemimpinan Tk IV Pola Kontribusi

Diklat ini diikuti oleh sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari Pejabat Eselon IV Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana yang bersumber dari dana Kontribusi peserta sebesar Rp.606.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.521.739.900,- (82,97%). Tidak tercapainya target realisasi keuangan 95% disebabkan karena adanya efisiensi belanja makan minum kegiatan yang direalisasikan sesuai jumlah peserta. Disamping itu terdapat sisa honor WI yang tidak dibayarkan karena ketentuan jumlah jam wajib mengajar diatas 21 JP. Namun kegiatan telah terlaksana dengan realisasi fisik 100%.

1. Diklat Kepemimpinan Tk III Pola Kontribusi

Diklat ini diikuti oleh 70 orang peserta yang berasal dari Pejabat Eselon III dari Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat dan diselenggarakan dalam 2 angkatan dengan dukungan dana yang bersumber dari dana Kontribusi peserta sebesar Rp.1.991.250.000,-. Dari target sebanyak 90 orang peserta (3 angkatan), terealisasi hanya 70 oarang peserta yang diselenggarakan dalam 2 angkatan. Kurangnya jumlah peserta ini mengakibatkan rendahnya realisasi keuangan yaitu sebesar Rp.1.256.275.208,- (63,09%). Namun secara fisik kegiatan telah terlaksana 100% dari jumlah peserta yang mendaftar.

1. Diklat Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD Kab/Kota pola kontribusi.

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan (realisasi keuangan 0%). Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Pengelolaan Keuangan Nagari/desa bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi 20%.

1. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Nagari bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan (realisasi keuangan 0%). Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Pengelolaan Perencanaan pembangunan nagari/desa bagi wali nagari/ kepala desa pola kontribusi

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Pengelolaan Administrasi pemerintahan nagari/desa bagi wali nagari/ kepala desa pola kontribusi

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Pengelolaan Aset nagari/Desa bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat legal drafting bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Peningkatan Kompetensi Bagi Lurah pola kontribusi

Diklat ini diikuti oleh sebanyak 27 orang peserta yang berasal dari Pejabat Lurah dilingkungan Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan dalam 1 angkatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana yang bersumber dari dana Kontribusi peserta sebesar Rp. 150.000.000,-. Dari target sebanyak 30 orang peserta, yang terealisasi hanya 27 peserta yang diselenggarakan dalam 1 angkatan. Kurangnya jumlah peserta mengakibatkan rendahnya realisasi keuangan yaitu sebesar Rp.93.782.200,- (62,52%). Disamping itu rendahnya realisasi keuangan juga disebabkan karena pembayaran honor WI Daerah yang harus mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 bahwa pembayaran honorarium WI dengan syarat harus melebihi jumlah minimal jam tatap muka 21 JP, sedangkan dalam pelaksanaannya masih banyak Widyaiswara yang belum memenuhi jam wajib tersebut sehingga honor WI tidak dapat dibayarkan. Namun secara fisik kegiatan telah terlaksana sebanyak 1 angkatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

1. Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol II Pola Kontribusi

Diklat ini diikuti oleh total 202 orang peserta yang berasal dari CPNS Gol. II Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat dan diselenggarakan dalam 6 angkatan dengan dukungan dana yang bersumber dari dana Kontribusi peserta sebesar Rp.1.800.000.000,-. Dari target sebanyak 802 orang peserta (21 angkatan), terrealisasi hanya 202 orang peserta yang diselenggarakan dalam 6 angkatan. Kurangnya jumlah peserta ini mengakibatkan realisasi keuangan menjadi sangat rendah yaitu sebesar Rp.375.803.450,- (20,88%). Namun secara fisik kegiatan telah terlaksana sebanyak 6 angkatan dengan realisasi fisik 100%.

1. Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol III Pola Kontribusi

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp.1.800.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah terrealisasi sebesar 20%.

1. **Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis**

Kegiatan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dengan menggunakan 2 (dua) sumber dana, yaitu dana APBD murni dan dana kontribusi. Anggaran yang berasal dari dana APBD murni adalah sebesar Rp.391.033.550,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.364.103.877,- (93,11%) yang terdiri dari 3 kegiatan. Sedangkan Anggaran yang berasal dari dana kontribusi adalah sebesar Rp.750.000.000,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan. Namun kelima kegiatan diklat teknis pola kontribusi ini batal dilaksanakan karena kuota peserta yang tidak terpenuhi.

1. Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Diklat ini diikuti sebanyak 30 orang peserta berasal dari OPD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 176.190.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 152.027.051,- (86,29%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Tidak tercapainya target realisasi keuangan disebabkan karena efisisensi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan adanya sisa pembayaran honor WI karena pada saat kegiatan dilaksanakan Pergub yang baru belum terbit, sehingga masih menggunakan standar pergub yang lama (Rp.100.000/JP).

1. Diklat Diklat Teknis Manajemen Bencana

Diklat ini diikuti oleh sebanyak 30 orang peserta berasal dari OPD Provinsi Sumatera Barat yang dileselenggarakan di Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 144.824.350,- dengan realisasi fisik 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.142.389.090,- (98,32%).

1. Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Teknis

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan Koordinasi dan evaluasi ke 19 Kab/Kota dilingkungan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kebutuhan peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan standar penyelenggaraan diklat teknis. Kegiatan ini menggunakan anggaran dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 70.019.100,- terealisasi dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.69.687.736,- (99,53%).

1. Diklat Teknis Pengelola Aset Untuk Perangkat Nagari (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi 20%.

1. Diklat Teknis Standar Akuntansi Pelaporan Berbasis Akrual (kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi 20%.

1. Diklat Teknis Penyusunan LAKIP (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi 20%.

1. Diklat Teknis Training of Course (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi 20%.

1. Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- tidak dapat direalisasikan dan realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. **Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional**

Kegiatan Diklat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dengan menggunakan 2 (dua) sumber dana, yaitu dana APBD murni dan dana Kontribusi. Anggaran yang berasal dari dana APBD murni adalah sebesar Rp.321.436.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.310.487.337,- (96,59%) yang terdiri dari 2 kegiatan. Sedangkan Anggaran yang berasal dari dana kontribusi adalah sebesar Rp.1.625.000.000,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan. Namun keenam kegiatan diklat teknis pola kontribusi ini batal dilaksanakan karena kuota peserta yang tidak terpenuhi.

1. Diklat Fungsional Pengawas Sekolah

Kegiatan diklat ini diikuti oleh sebanyak 30 orang peserta calon pengawas sekolah yang berasal dari SMA/SMK dilingkungan Provinsi Sumatera Barat yang dileselenggarakan di Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana APBD sebesar Rp.246.142.500,- dengan realisasi fisik 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.242.911.260,- (98,69%).

1. Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Fungsional

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan Koordinasi dan evaluasi ke 19 Kab/Kota dilingkungan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kebutuhan peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan standar penyelenggaraan Diklat Fungsional. Kegiatan ini menggunakan anggaran dengan sumber dana APBD sebesar Rp.75.293.500,- terealisasi dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.67.576.077,- (89,75%). Tidak tercapainya target realisasi keuangan 95 % disebabkan karena alasan efisiensi perjalanan dinas dalam daerah dan makan minum kegiatan.

1. Diklat Fungsional Penghitungan Angka Kredit Guru (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta akibatnya anggaran sebesar Rp.195.000.000,- tidak dapat direalisasikan sehingga realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta, akibatnya anggaran sebesar Rp.195.000.000,- tidak dapat direalisasikan sehingga realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Calon Pengawas Sekolah (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta, akibatnya anggaran sebesar Rp.195.000.000,- tidak dapat direalisasikan sehingga realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp.195.000.000,- tidak dapat direalisasikan, akibatnya realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Fungsional Calon Widyaiwara (CAWID) Kontribusi

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 485.000.000,- tidak dapat direalisasikan, akibatnya realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. Diklat Fungsional Pengendalian Lingkungan Hidup (Kontribusi)

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- tidak dapat direalisasikan, akibatnya realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%.

1. **Pengelolaan Peningkatan Pendidikan Aparatur dan IPDN**

Kegiatan Pengelolaan Peningkatan Pendidikan Aparatur dan IPDN dilaksanakan oleh Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp.176.256.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.116.545.800,- (66,12%).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan beasiswa tugas belajar kepada 3 orang aparatur yang berasal dari OPD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dianggarkan pada DPA BPSDM Provinsi Sumatera Barat dengan sumber dana yang berasal dari APBD murni sebesar Rp.176.256.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.116.545.800,- (66,12%). Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena adanya sisa beasiswa cost sharing dengan ABPN serta sisa pembayaran Bantuan Uang SPP, karena mahasiswa yang bersangkutan lulus lebih cepat. Namun secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dimana ketiga peserta telah terpenuhi kebutuhan pendidikannya.

### Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Indikator outcome program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah Meningkatnya kualitas kelembagaan BPSDM dengan target kinerja 60%. Pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.611.545.070,- dengan total kegiatan sebanyak 11 kegiatan. Anggaran tersebut berasal dari 2 sumber dana yaitu ABPD murni sebesar Rp.1.168.545.070,- (72,51%) dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan, sementara 1 kegiatan lagi berasal dari dana kontribusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.443.000.000,- (27,49%).

Komposisi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tahun Aanggaran 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Sumber Dana** | |
| **APBD Murni** | **Dana Kontribusi** |
| Jumlah Kegiatan | 10 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| Pagu Anggaran 2018 | Rp.1.168.545.070,- | Rp.443.000.000,- |
| Komposisi sumber dana | 72,51% | 27,49% |
| Realisasi Anggaran 2018 | Rp. 930.827.241,- | Rp.0,- |
| Capaian Keuangan | 79,66 % | 0 % |

Capaian realisasi keuangan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ini adalah sebesar Rp. 930.827.241,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 78,03% dan realisasi fisik sebesar 92,73% melalui 11 kegiatan-kegiatan berikut.

* 1. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Belajar

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran yang berasal dari APBD Murni sebesar Rp.15.412.350,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.14.367.650,- (93,22%). Realisasi fisik tercapai 100% dengan output kegiatan yaitu terlaksananya pengembangan sumber belajar (pengelolaan kepustakaan, modul kurikulum/silabi, laboratorium). Kurang tercapainya target realisasi keuangan 95% disebabkan karena adanya efisiensi belanja dengan harga dibawah standar harga/DPA.

* 1. Sertifikasi Kompetensi Aparatur

Kegiatan ini bermaksud untuk melaksanakan Uji Kompetensi kepada 48 orang Aparatur dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan 12 orang Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.251.298.900,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.159.126.500,- (63,32%). Rendahnya capaian realisasi keuangan disebabkan karena dari jumlah total peserta yang direncanakan sebanyak 60 orang tidak dapat direalisasikan seluruhnya dikarenakan calon peserta yang lulus verifikasi administrasi hanya sebanyak 27 orang, sehingga anggaran hanya dapat direalisasikan sebanyak jumlah peserta tersebut. Kegiatan telah telah dilaksanakan selama 4 hari dengan realisasi fisik 100%.

* 1. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur fungsional tertentu dan struktural di lingkungan BPSDM provinsi Sumatera Barat melalui pendidikan dan pelatihan. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 390.660.500,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni. Realisasi keuangan tercapai sebesar Rp.385.742.460,- dengan persentase capaian sebesar 98,74% dan realisasi fisik 100%.

* 1. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan pengendalian internal di lingkungan BPSDM provinsi Sumatera Barat dengan melaksanakan SPIP dan menyediakan 10 dokumen SPIP. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.10.320.550,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni. Realisasi keuangan tercapai sebesar Rp.10.012.500,- dengan persentase capaian sebesar 97,02% dan realisasi fisik 100%.

* 1. Pengendalian dan Penjaminan Mutu Diklat

Kegiatan ini bermaksud untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat aparatur agar terjaminnya mutu diklat. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.97.736.000,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni. Realisasi keuangan sebesar Rp.91.199.612,- (93,31%) dengan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan Informasi tentang hasil dari monev kediklatan dan meningkatnya mutu diklat. Tidak tercapainya target realisasi keuangan 95% disebabkan karena alasan efisiensi.

* 1. Penyusunan Statistik Diklat, Kalender dan Buletin Diklat

Kegiatan ini bermaksud untuk melaksanakan Penyusunan Buku Statistik Diklat, Kalender Diklat dan Buletin Informasi Diklat. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.133.178.200,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni. Realisasi keuangan sebesar Rp.117.844.255,- (88,49%). Tidak tercapainya target realisasi keuangan 95% disebabkan karena adanya sisa dana perjalanan dinas eselon 2 yang batal berangkat ke Bali karena alasan dinas. Disamping itu juga terdapat sisa karena efisiensi belanja cetak dan penggandaan dan alat tulis kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data dokumentasi dan Informasi tentang kediklatan (jenis diklat, alumni diklat yang akurat dan KTI) dengan output sebanyak 750 eksemplar. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi fisik 100%.

* 1. Akreditasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan

Kegiatan ini bermaksud agar terlaksananya reakreditasi pelaksanaan Diklat Pimipinan dan Prajabatan di BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.118.482.780,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni. Realisasi keuangan sebesar Rp.24.333.280,- (20,54%). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena terjadinya perubahan sistem input data dari SIDA LAN ke SIPKA LAN pada saat proses Re-Akreditasi, sehingga data2 yg diinputkan tidak ter-update sampai dengan batas waktu 90 hari kerja dan target kinerja LAN-RI tahun 2018 sehingga sertifikasi akreditasi tidak dapat diperoleh. Namun proses kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%.

* 1. Penelitian Widyaiswara

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terlaksananya penelitian widyaiswara di BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 18.326.100,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni. Realisasi keuangan sebesar Rp.17.194.280,- dengan capaian realisasi keuangan 93,82%. Tidak tercapainya target realisasi keuangan 95% disebabkan karena adanya sisa belanja efisiensi alat tulis kantor, bahan bakar minyak dan sisa belanja cetak penggandaan. Namun proses kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi fisik 100%.

* 1. Pengelolaan Angka Kredit Widyaiswara

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan perhitungan angka kredit widyaiswara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 63.389.000,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni. Realisasi keuangan sebesar Rp.51.182.100,- dengan capaian realisasi keuangan 80,74%. Tidak tercapainya target realisasi keuangan 95% disebabkan karena adanya sisa efisiensi belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta adanya sisa belanja makan dan minum sidang dan rapat persiapan sidang yang tidak terealisasi karena sidang yang direncanakan 2 kali namun terlaksana hanya 1 kali karena Dupak yang masuk per periode satu tahun, bukan per semester. Namun kegiatan perhitungan angka kredit WI ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%.

* 1. Rapat koordinasi perencanaan dan forum OPD kediklatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh hasil kesepakatan Rakor dengan OPD di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya sinergitas perencanaan diklat aparatur dengan output 1 berkas dokumen kesepakatan. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 69.740.090,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Murni. Realisasi keuangan sebesar Rp.59.824.604,- dengan capaian realisasi keuangan 85,78%. Tidak tercapainya target realisasi keuangan 95% disebabkan karena sisa efisiensi ATK dan uang saku peserta forum OPD sebesar Rp. 7.500.000 yang batal dibayarkan karena adanya aturan yang menyatakan bahwa uang saku tersebut tidak boleh dibayarkan. Namun kegiatan ini telah dilaksanakan di BPSDM Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi fisik 100%.

* 1. Uji Kompetensi Sertifikasi (Pola Kontribusi)

Kegiatan ini bermaksud untuk melaksanakan uji kompetensi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur fungsional tertentu dilingkungan pemerintah provinsi, kab/kota se sumatera barat. Anggaran dialokasikan sebesar Rp.433.000.000,- dengan sumber dana yang berasal dari dana kontribusi peserta. Anggaran pada kegiatan ini batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya kuota peserta sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan dan akibatnya realisasi keuangan menjadi 0%. Namun secara fisik kegiatan-kegiatan persiapan awal telah teralisasi sebesar 20%. Dana untuk kegiatan yang sama sebenarnya sudah tertampung pada APBN (dana dekonsentrasi), maka dari itu kegiatan ini sebenarnya sudah diusulkan untuk dihapus pada APBD Perubahan.

**3. Permasalahan dan Solusi**

* + 1. **Permasalahan**

1. Pada Program Pendidikan Kedinasan terdapat 19 kegiatan diklat pola kontribusi dengan total anggaran sebesar Rp.6.667.374.000,- yang batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya jumlah kouta peserta. Anggaran tersebut sebenarnya sudah diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada proses perubahan anggaran tahun 2018. Namun karena terdapat beberapa permasalahan dalam sistem penganggaran dan koordinasi antar OPD pembuat kebijakan terkait anggaran perubahan, maka 19 kegiatan yang telah diusulkan untuk dihapuskan tersebut tetap muncul dalam ABPD Perubahan tahun 2018. Hal ini mengakibatkan rendahnya capaian kinerja BPSDM Provinsi Sumatera Barat baik dari segi realisasi keuangan maupun fisik kegiatan.
2. Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdapat 1 kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Pola Kontribusi dengan anggaran sebesar Rp.433.000.000,- yang juga batal dilaksanakan. Dana untuk kegiatan yang sama ternyata sudah tertampung pada anggaran Dana Dekonsentrasi APBN, akibatnya banyak peserta yang lebih memilih untuk ikut dalam kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur dimana untuk mengikuti kegiatan tersebut peserta tidak dibebankan dengan kewajiban membayar biaya kontribusi. Hal ini menyebakan kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Pola Kontribusi dengan anggaran sebesar Rp.433.000.000,- harus dibatalkan. Terhadap kegiatan yang batal ini sebenarnya sudah diusulkan untuk dilakukan penghapusan anggaran kegiatannya pada proses perubahan anggaran tahun 2018. Namun karena terdapat beberapa permasalahan dalam sistem penganggaran dan koordinasi antar OPD pembuat kebijakan terkait anggaran perubahan, maka kegiatan ini tetap muncul dalam ABPD Perubahan tahun 2018. Hal ini mengakibatkan rendahnya capaian kinerja BPSDM Provinsi Sumatera Barat baik dari segi realisasi keuangan maupun fisik kegiatan.
3. Disamping permasalahan-permasalahan diatas terdapat hal yang tidak terantisipasi sebelumnya yaitu tidak diprediksinya pembatalan pengiriman peserta dari kabupaten/kota dan tidak adanya aturan yang mengikat bagi Instansi yang mengikutsertakan aparaturnya untuk mengikuti diklat. Apabila kurangnya jumlah peserta diketahui pada saat perencanaan kegiatan dan penganggaraan sampai dengan penetapan APBD Provinsi Sumatera Barat, maka masih bisa diantisipasi dengan membatalkannya di Perubahan APBD, namun jika kurangnya peserta pada saat sudah melewati jadwal perubahan APBD hal ini tentu berakibat kepada capaian kinerja akhir tahun yang rendah.
4. Estimasi anggaran saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan diklat yang cukup *urgent.* Hal ini disebabkan karena tidak terrekomendasinya penambahan anggaran untuk penyelenggaraan diklat dengan sumber dana APBD murni.
5. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pasca Diklat, masih ditemui hal-hal sebagai berikut :
   * Pemberdayaan alumni diklat belum ditempatkan pada pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kompetensi yang telah dimilikinya.
   * Pengiriman peserta Diklat oleh Instansi pengirim masih berorientasi kepada aparatur yang tidak produktif (aparatur yang tidak memiliki uraian tugas yang jelas).
   * Rekomendasi yang telah disampaikan kepada instansi pengirim untuk pemberdayaan alumni diklat belum ditanggapi secara serius, sehinggga masih bersifat penyelenggaraan (proses) belum melihat kualitas secara keseluruhan seperti pemanfaatan alumni, kesesuaian alumni diklat dengan tempat penugasan.
6. Masih ditemui permasalahan pelaksanaan Diklat melalui Pola Kontribusi, yaitu dengan menetapkan target pendapatan yang telah ditetapkan akan menjadi capaian taget kinerja OPD, dan apabila target tidak tercapai akan mempengaruhi capaian target kinerja OPD. Hal ini terjadi apabila kabupaten/kota tidak mengirimkan peserta, maka akan terjadi pula pengurangan pendapatan, sementara untuk pengurangan kegiatan belanja tidak dapat dilakukan karena sudah menjadi target APBD murni.
   * 1. **Solusi**
        + 1. Adanya regulasi yang menyatakan dengan tegas, bahwa pengiriman peserta diklat harus sesuai dengan uraian tugas yang diberikan kepada calon peserta sehingga akan dapat menghasilkan alumni diklat yang siap pakai, hasilnya mereka akan mampu berkinerja sesuai tupoksi dan pencapaian tujuan visi dan misi oraganisasi.
          2. Kuantitas dan kualitas Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan dan Pasca Diklat perlu ditingkatkan (perlu dianggarkan). Diharapkan jika anggaran monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan Pasca Diklat lebih memadai maka pelaksanaan Monev dapat dilaksanakan secara proporsional. Sehingga tujuan misi kedua Gubernur Sumatera Barat yaitu ”*Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”*  dapat tercapai baik dari segi SDM, sarana prasarana dan Kurikulumnya. Hal ini juga dimaksudkan agar hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat benar-benar dimanfaatkan dalam efektivitas perencanaan kebutuhan diklat dimasa yang akan datang.
          3. Pelaksanaan Diklat melalui Pola Kontribusi sangat erat kaitannya dengan capaian kinerja OPD, agar tidak menimbulkan permasalahan capaian kinerja sebagaimana dimaksud. Percepatan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu solusi yang perlu menjadi pertimbangan.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah.

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651212 199112 1 001